

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA

Lilis Novia Saraswati¹

Abstrak

Lilis Novia Saraswati, *“Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Di bawah bimbingan Bapak Dr. H.Syahrani, M.Si sebagai pembimbing 1 dan Bapak Dr. Enos Paselle, M.AP sebagai pembimbing II.*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan indikator: Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar yang terdiri dari mekanisme pengusulan, sosialisasi, pelayanan pengaduan masyarakat, dan pemantauan pelaksanaan PIP serta faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder, dimana data primer didapat dari key informan yaitu Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda yang dipilih melalui teknik purposive sampling, dan informan yaitu Staff Kelembagaan Peserta Didik yang juga bertugas sebagai Operator Program Indonesia Pintar untuk jenjang SD di Kota Samarinda, Kepala Sekolah dan Operator Sekolah yang tugasnya berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti dengan menggunakan teknik purposive sampling, selain itu juga orang tua siswa yang menerima bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP) serta orang tua siswa yang dalam kriteria masuk sebagai penerima bantuan dana Program Indonesia Pintar namun kenyataannya tidak menerima. Kemudian data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, serta internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya hal ini terlihat dari beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan PIP sehingga belum sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan PIP, diantaranya data yang digunakan dalam penentuan siswa calon penerima KIP masih kurang akurat, waktu pencairan dana PIP yang terlambat, kegiatan sosialisasi yang masih kurang optimal dilakukan, lamanya waktu verifikasi kepemilikan KIP, serta masih rendahnya kesadaran wali murid tentang peruntukkan bantuan PIP.

Kata Kunci : Implementasi, kebijakan, program indonesia pintar

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut pasal 1 mengamanatkan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai pihak penyelenggara sistem pendidikan nasional. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang hingga saat ini dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di Indonesia.

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh tertinggal dari negara-negara lainnya. Menurut data dari UNESCO pada tahun 2015, pendidikan di Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Sedangkan komponen penting dalam pendidikan yaitu para guru menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Buruknya kualitas pendidikan di Indonesia bisa dilihat dari berbagai permasalahan, diantaranya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang masih kurang, sarana prasarana pendukung pendidikan yang tidak memadai, adanya perbedaan kelas sosial antar siswa, serta biaya pendidikan yang sangat mahal. Permasalahan tersebut sering kali mengakibatkan tingginya tingkat anak putus sekolah.

Menyadari kompleksnya permasalahan tersebut, pemerintah selaku pembuat dan pelaksana kebijakan sejak lama telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke-4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib belajar 9 tahun untuk pendidikan formal di Indonesia, kebijakan tersebut didukung dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi siswa dengan kondisi sosial ekonomi yang tidak mampu. Selanjutnya tahun 2014, pada masa presiden Joko Widodo, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS) untuk membangun keluarga produktif. Inpres tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Pintar diartikan sebagai “Bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya”.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, diperoleh beberapa permasalahan, yaitu data yang digunakan dalam penentuan calon siswa penerima PIP masih kurang akurat dan sosialisasi yang kurang optimal dilakukan. Oleh karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda,”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
- 2) Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Untuk menambah, memperdalam serta mengembangkan pengetahuan penulis serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan-ketentuan karya ilmiah di Universitas Mulawarman
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial terutama Ilmu Administrasi

- negara, khususnya pada mata kuliah Kebijakan Publik
- c. Menentukan jawaban atas masalah atau kendala-kendala yang ada dalam Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
2. Manfaat Praktis, yaitu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek, diantaranya:
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang ingin menggunakan hasil penelitian sebagai bahan perbandingan terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
 - b. Sebagai informasi bagi pihak lain yang berkepentingan yang ingin menggunakan hasil penelitian sebagai bahan perbandingan terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda
 - c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori dan Konsep

Teori selalu diperlukan dalam kegiatan penelitian. Menurut Kerlinger (dalam Sugiyono, 2014:41) teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan preposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Kebijakan Publik

Mustopadidjaja (dalam Tahir, 2014:21) menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Sedangkan menurut Anderson (dalam Tahir, 2014:21), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (dalam Syahrani, 2015:89), Implementasi kebijakan sebagai suatu proses, suatu *output* (keluaran) atau suatu hasil akhir (*outcome*). Dilihat dari proses, implementasi akan mengacu pada serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk sesegera mungkin menghasilkan akibat-akibat tertentu yang dikehendaki. Konsep *output*/keluaran implementasi mengacu pada cara-cara atau sarana yang telah dipakai untuk mencapai tujuan tertentu yang telah diprogramkan. Sedangkan yang

dimaksud dengan hasil akhir implementasi ialah terjadinya perubahan-perubahan tertentu pada permasalahan sosial dalam skala luas yang ingin diatasi oleh suatu program.

Pendidikan Dasar

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kelembagaan Pendidikan

Berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. Jalur Pendidikan. Jalur pendidikan di Indonesia (dalam Tirtarahardja, 2008:263-264) terdiri dari Jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Sedangkan Jenjang Pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran yang terdiri dari jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi

Program Indonesia Pintar

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar Pasal 1, Program Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut PIP, adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya.

Definisi Konsepsional

Adapun definisi konsepsional dari penelitian ini yaitu: Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda adalah Pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang meliputi merencanakan, merumuskan, dan mengevaluasi kebijakan atau program pembangunan di bidang pendidikan nasional guna memahami dan mampu memperbaiki permasalahan pendidikan secara efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2014 : 2).

Fokus Penelitian

Adapun dalam Penelitian ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, yang menjadi fokus penelitian adalah :

- A. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, meliputi :
 - 1. Mekanisme pengusulan peserta didik calon penerima KIP
 - 2. Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP)
 - 3. Pelayanan pengaduan masyarakat mengenai PIP
 - 4. Pemantauan penggunaan dana PIP
- B. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

Lokasi Penelitian

Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penentuan *sampling* dengan menggunakan hasil akreditasi Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Kota Samarinda, maka penentuan lokasi dalam penelitian ini lebih dispesifikkan dengan didasarkan pada *proposional sampling*. Lokasi penelitian ini berada di 4 (empat) Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang, yaitu :

- 1. SDN 004 Sungai Pinang, Akreditasi C
- 2. SDN 005 Sungai Pinang, Akreditasi A
- 3. SDN 007 Sungai Pinang, Akreditasi B
- 4. SDN 012 Sungai Pinang, Akreditasi B

Sumber Data

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dan yang menjadi *informan* lain yaitu Operator PIP jenjang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Kepala Sekolah, Operator Sekolah, serta orang tua siswa penerima dan yang bukan penerima PIP.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari observasi, wawancara. Dan Pengumpulan data dengan dokumen.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Analisis Data Model Interaktif oleh Matthew B. Milles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. Sebagaimana di katakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Collection*, *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications* yang dapat digambarkan pada gambar 3.1 (Matthew B. Milles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, 2014:31-33)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Sungai Pinang merupakan pecahan dari kecamatan Samarinda Utara tanggal 28 Desember 2010 (Kecamatan Samarinda Utara pecahan dari Kecamatan Samarinda Ilir berdasarkan PP No. 38 Tahun 1996). Kecamatan Sungai Pinang adalah salah satu dari sepuluh Kecamatan Daerah Kota Samarinda yang mempunyai luas wilayah 2.450,54 ha. Kecamatan Sungai Pinang terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu Kelurahan Temindung permai, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan sungai Pinang dalam, Kelurahan Mugirejo, dan kelurahan Bandara.

Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penentuan *sampling* dengan menggunakan hasil akreditasi Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Kota Samarinda, maka lokasi penelitian ini berada di 4 (empat) Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang, yaitu :

- 1) SDN 004 Sungai Pinang
- 2) SDN 005 Sungai Pinang
- 3) SDN 007 Sungai Pinang
- 4) SDN 012 Sungai Pinang

Hasil Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda serta mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Program Indonesia pintar di wilayah tersebut. Agar tercapai tujuan dari penelitian ini maka penulis memfokuskan penelitian pada mekanisme pengusulan penerima dana Program Indonesia Pintar, sosialisasi Program Indonesia Pintar, pelayanan pengaduan serta pemantauan Program Indonesia Pintar.

A. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, meliputi :

1) Mekanisme pengusulan peserta didik calon penerima KIP

Pengusulan peserta didik calon penerima KIP merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan PIP, karena pada tahap inilah ditentukan siswa/peserta didik yang berhak menerima dana PIP. Untuk mekanisme pengusulan peserta didik calon penerima KIP di Kecamatan Sungai Pinang pada 4 lokasi penelitian akan penulis rincikan sebagai berikut:

- a. Pada SDN 004 Sungai Pinang dengan akreditasi C, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, diketahui bahwa banyak orang tua siswa yang dalam pengurusan berkas pengusulan tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sebenarnya merupakan salah satu syarat dalam penentuan bagi siswa calon penerima KIP. Orang tua siswa masih banyak yang menggunakan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan, dimana surat keterangan tidak mampu tersebut kurang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- b. Pada SDN 005 Sungai Pinang dengan akreditasi A, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, mekanisme pengusulan bagi siswa/peserta didik calon penerima KIP sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan, karena siswa yang diusulkan oleh sekolah sebagai calon penerima KIP harus berasal dari keluarga yang mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai bukti bahwa siswa tersebut berasal dari keluarga tidak mampu.
- c. Pada SDN 007 Sungai Pinang dengan Akreditasi B, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, mekanisme pengusulan bagi siswa/peserta didik calon penerima KIP sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan, karena sekolah lebih memprioritaskan siswa/ peserta didik yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk diusulkan sebagai siswa calon penerima KIP
- d. Pada SDN 012 Sungai Pinang dengan Akreditasi B, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, mekanisme pengusulan bagi siswa/peserta didik calon penerima KIP sudah berjalan dengan cukup baik. Sekolah menyamaratakan pengusulan antara siswa yang berasal dari keluarga pemegang KKS maupun siswa yang bukan berasal dari keluarga pemegang KKS.

2) Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP)

Untuk sosialisasi kebijakan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Sungai Pinang sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan tidak

mengalami kendala yang berarti. Untuk sosialisasi mengenai PIP dari pihak sekolah kepada orang tua siswayang berasal dari 4 lokasi penelitian akan penulis rincikan sebagai berikut:

- a. SDN 004 Sungai Pinang dengan Akreditasi C, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, kegiatan sosialisasi hanya pernah dilaksanakan sebanyak 2 kali pada saat rapat / pertemuan orangtua siswa. Hal tersebut dirasa kurang optimal dilakukan sehingga masih ada orang tua siswa yang belum memahami mengenai Program Indonesia Pintar secara baik .
- b. SDN 005 Sungai Pinang dengan Akreditasi A, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam setiap rapat/ pertemuan dengan orang tua siswa, selain melalui sosialisasi langsung, sekolah juga melakukan sosialisasi tidak langsung menggunakan mading sekolah
- c. SDN 007 Sungai Pinang dengan Akreditasi B, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, kegiatan sosialisasi hanya dilaksanakan beberapa kali sehingga masih ada orang tua siswa yang belum memahami mengenai Program Indonesia Pintar secara baik .
- d. SDN 012 Sungai Pinang dengan Akreditasi B, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, kegiatan sosialisasi pernah dilaksanakan 2kali dalam rapat orang tua siswa, namun masih ada saja orang tua siswa yang belum memahami mengenai Program Indonesia Pintar secara baik

3) Pelayanan pengaduan masyarakat mengenai PIP

Masyarakat yang ingin menyampaikan kritik, saran, maupun pendapatnya mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) sudah mendapatkan pelayanan/ difasilitasi dengan baik oleh pihak dinas pendidikan maupun pihak sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, masyarakat bisa datang ke Sekolah maupun ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, sedangkan secara tidak langsung bisa melalui *website* atau ke nomor pengaduan yang tertera di *website* PIP. Untuk pelayanan pengaduan mengenai PIP pada 4 lokasi penelitianakan penulis rincikan sebagai berikut:

- a. SDN 004 Sungai Pinang dengan Akreditasi C, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, pengaduan dari orang tua siswa selalu diterima dan dijelaskan dengan baik oleh pihak sekolah.
- b. SDN 005 Sungai Pinang dengan Akreditasi A, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, pengaduan

dari orang tua siswa selalu diterima dan dijelaskan dengan baik oleh pihak sekolah. Sekolah juga menyarankan kepada orang tua siswa agar melakukan pengaduan ke Dinas Pendidikan Kota agar lebih cepat ditangani.

- c. SDN 007 Sungai Pinang dengan Akreditasi B, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, pengaduan dari orang tua siswa selalu diterima dan dijelaskan dengan baik oleh pihak sekolah. Sekolah juga menyarankan kepada orang tua siswa agar melakukan pengaduan ke Dinas Pendidikan Kota maupun ke *website* resmi agar lebih cepat ditangani.
- d. SDN 012 Sungai Pinang dengan Akreditasi B, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, pengaduan dari orang tua siswa selalu diterima dan dijelaskan dengan baik oleh pihak sekolah. Sekolah juga menyarankan kepada orang tua siswa agar melakukan pengaduan ke Dinas Pendidikan Kota maupun ke *website* resmi agar lebih cepat ditangani.

4) Pemantauan penggunaan dana PIP

Untuk pemantauan penggunaan dana PIP oleh siswa dan orang tua siswa pada 4 lokasi penelitianakan penulis rincikan sebagai berikut:

- a. SDN 004 Sungai Pinang dengan Akreditasi C, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, pemantauan penggunaan dana PIP oleh sekolah kepada siswa dan orang tua siswa sudah dilaksanakan dengan baik. Sekolah memastikan kelengkapan keperluan sekolah secara langsung terhadap siswa penerima PIP.
- b. SDN 005 Sungai Pinang dengan Akreditasi A, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, pemantauan penggunaan dana PIP oleh sekolah kepada siswa dan orang tua siswa sudah dilaksanakan dengan baik. Pihak sekolah selalu memastikan kelengkapan keperluan sekolah secara langsung terhadap siswa penerima PIP sehingga dapat dipastikan ketepatan penggunaan dana oleh siswa dan orangtua siswa.
- c. SDN 007 Sungai Pinang dengan Akreditasi B, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, pemantauan penggunaan dana PIP oleh sekolah kepada siswa dan orang tua siswa hanya dilaksanakan pada saat sosialisasi dilakukan. Mengenai kesesuaian penggunaan dana PIP sepenuhnya merupakan kewenangan penuh orangtua siswa.
- d. SDN 012 Sungai Pinang dengan Akreditasi B, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan orang tua siswa, pemantauan penggunaan dana PIP oleh sekolah kepada siswa dan orang tua

siswa dilaksanakan secara langsung dan berkelanjutan. Kepada siswa penerima KIP sekolah memastikan bahwa keperluan perlengkapan siswa tersebut sudah terpenuhi dengan baik.

B. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Pinang Kota Samarinda berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Faktor keakuratan data yang digunakan sebagai penentu peserta didik calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih kurang.
2. Faktor waktu pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang terlambat
3. Faktor Sosialisasi yang kurang optimal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda
4. Faktor lamanya waktu verifikasi kepemilikan kartu
5. Faktor masih rendahnya kesadaran orangtua siswa tentang prosedur dan sasaran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ada beberapa kesimpulan yang penulis peroleh, yaitu :

1. Implementasi Program Indonesia Pintar jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang tentang:
 - a. Mekanisme pengusulan peserta didik calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah dilaksanakan dengan cukup baik hanya saja masih ada sedikit ketidakakuratan data yang digunakan.
 - b. Untuk sosialisasi mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) sudah cukup baik dilaksanakan hanya saja kurang optimal.
 - c. Mengenai pelayanan pengaduan masyarakat mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) sudah difasilitasi dengan baik oleh pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun oleh pihak sekolah
 - d. Mengenai pemantauan penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Samarinda sudah dilaksanakan dengan baik karena penggunaan dana oleh orangtua siswa penerima PIP sudah tepat untuk kebutuhan sekolah.
2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Program Indonesia Pintar jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang, diantaranya adalah

faktor keakuratan data yang digunakan sebagai penentu peserta didik calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih kurang, faktor waktu pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang terlambat, faktor Sosialisasi yang kurang optimal dilakukan oleh pihak sekolah dan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda, faktor lamanya waktu verifikasi kepemilikan kartu, faktor masih rendahnya kesadaran orangtua siswa tentang prosedur dan sasaran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

5.2 Saran

Secara umum, pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Sungai Pinang sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan PIP. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Diharapkan kepada pihak sekolah agar lebih memperhatikan Petunjuk Pelaksanaan PIP yang menyatakan bahwa siswa yang berhak diusulkan oleh sekolah sebagai adalah siswa yang berasal dari keluarga pemegang Kartu keluarga Sejahtera (KKS), bukan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan agar Program Indonesia Pintar yang dijalankan bisa tepat sasaran.
2. Diharapkan pemerintah bisa lebih menyesuaikan ketepatan waktu pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP), agar siswa yang benar-benar membutuhkan bisa menggunakan dana tersebut untuk keperluan sekolahnya.
3. Diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda lebih optimal
4. Diharapkan pihak sekolah bisa lebih intens dalam melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa agar orangtua siswa dapat lebih memahami mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) dengan baik.
5. Diharapkan pemerintah bisa memperbaharui aplikasi verifikasi kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar dalam proses verifikasi kepemilikan kartu tidak lagi membutuhkan proses yang lama.
6. Sebaiknya peran sekolah dalam penentuan siswa penerima KIP dan pengawasan penggunaan dana PIP lebih dioptimalkan dan diikutsertakan kembali agar sasaran KIP lebih tepat sasaran dan pemantauan penggunaan dana bisa lebih optimal dilakukan.
7. Diharapkan bagi masyarakat khususnya di Kota Samarinda hendaknya bisa lebih memahami dan menaati bahwa ketentuan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah diperuntukkan bagi siswa/peserta didik dari keluarga yang kurang mampu sehingga sikap egois dan apatis terhadap sesama harus mampu dikendalikan agar Program Indonesia Pintar (PIP) bisa lebih tepat sasaran.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Miles, Mathew H., A Michael Huberman, dan Jhonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analisis*. London: Arizona state University

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

_____, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Makindo Grafika

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta

Sumber Dokumen :

Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (KIS) untuk Membangun Keluarga Produktif

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar